



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 30 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2014**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 700/06/Itwil.IV/X/2014 dengan Nomor Temuan 15, yaitu terdapat sebanyak 10 (sepuluh) DPP Partai Politik, 11 (sebelas) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan 6 (enam) Kelompok Masyarakat Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Tahun Anggaran 2013, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta**

**Untuk : Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan Tahun 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal  
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 30 TAHUN 2015  
Tanggal 3 Maret 2015

DAFTAR DEWAN PENGURUS PARTAI POLITIK/ORGANISASI KEMASYARAKATAN/  
KELOMPOK MASYARAKAT YANG BELUM MENYAMPAIKAN LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN/  
DANA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH TAHUN ANGGARAN 2013

No.	Penerima Bantuan Keuangan/Hibah/Bantuan Sosial	Jumlah Bantuan (Rp)	Keterangan
	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		
1.	Partai Demokrat	495.630.550,00	Belum melaporkan
2.	Partai Keadilan	254.284.870,00	Belum melaporkan
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	158.478.530,00	Belum melaporkan
4.	Partai Golkar	95.438.980,00	Belum melaporkan
5.	Partai Persatuan Pembangunan	76.003.750,00	Belum melaporkan
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	76.228.840,00	Belum melaporkan
7.	Partai Amanat Nasional	61.596.760,00	Belum melaporkan
8.	Partai Damai Sejahtera	52.311.900,00	Belum melaporkan
9.	Partai Hati Nurani Rakyat	38.439.140,00	Belum melaporkan
10.	Partai Kebangkitan Bangsa	30.169.850,00	Belum melaporkan
	Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan		
1.	Kel. Besar Wirawati Catur Panca PD. Jakarta	100.000.000,00	Belum melaporkan
2.	Wanita Veteran RI DKI Jakarta	50.000.000,00	Belum melaporkan
3.	Persatuan Istri Veteran RI DKI	100.000.000,00	Belum melaporkan
4.	Korps Cacat Veteran DKI Jaya	50.000.000,00	Belum melaporkan
5.	DPD Pepabri DKI Jakarta		Belum melaporkan
6.	Ikatan Keluarga Pahlawan	100.000.000,00	Belum melaporkan
7.	Serikat Pekerja NIBA, KSPSI	79.500.000,00	Belum melaporkan
8.	Lembaga Pembinaan Masyarakat Jakarta	50.000.000,00	Belum melaporkan
9.	Putera Pembebas Bangsa Jln. Galur	50.000.000,00	Belum melaporkan
10.	Jaringan Taruna Jayakarta	50.000.000,00	Belum melaporkan
11.	DPD Ormas MKGR	100.000.000,00	Belum melaporkan
	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat		
1.	Badan Musyawarah BETAWI	1.200.000.000,00	Belum melaporkan
2.	Forum Kerukunan Umat Beragama	1.500.000.000,00	Belum melaporkan
3.	DHD 45 Provinsi Jakarta	250.000.000,00	Belum melaporkan
4.	Dewan Perwakilan Daerah RI Provinsi DKI	1.500.000.000,00	Belum melaporkan
5.	Legium Veteran RI	200.000.000,00	Belum melaporkan
6.	DPD PEPABRI DKI Jakarta	500.000.000,00	Belum melaporkan
	Jumlah	7.218.083.170,00	Belum melaporkan

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
Basuki T. Purnama

